

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis untuk pembangunan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka hak dan tanggungjawab pemerintah daerah semakin tinggi baik itu dalam pengelolaan sumber daya alam, manusia dan potensi yang ada. Agar dapat melaksanakan hak dan tanggungjawab tersebut secara efisien dan efektif, maka organisasi pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang strategis dan operasional pemerintah secara efisien dan efektif dengan berlandaskan pada prinsip *good governance*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembanguna jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja daerah.

Perencanaan dan pembangunan dalam sistem pemerintahan baik dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah saat ini membutuhkan dukungan sistem informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan, menyimpan dan memproses kebutuhan data. Perpaduan antara sistem informasi manajemen dengan perencanaan pembangunan daerah sudah banyak dimanfaatkan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan memiliki tujuan memperbaiki hasil informasi yang dihasilkan, selain itu juga akan membuat perencanaan pembangunan menjadi konsisten mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota bagi pemerintah daerah yang sampai tingkat nasional sampai pemerintah pusat.¹

Akan tetapi untuk menyusun perencanaan pembangunan permasalahan yang sering dialami oleh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dalam penyusunan rencana, yaitu SKPD kesulitan dalam menyusun dokumen rencana dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data capaian/realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah, serta relevansi sehingga sasaran program dan kegiatan belum mencapai seperti apa yang diharapkan.

Kemudian permasalahan lainnya adalah adanya penyesuaian terhadap target rencana setiap tahun dalam renstra yang sering kali menjadi permasalahan tentang apa perlu tidaknya mengadakan perubahan atau penyesuaian. Hal ini

¹BalgiFahmi Sani, Harianto, “**Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penerapan Pembangunan Berbasis E-planning**” Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Vo 9 No 1, juni 2017,h 58.

tentunya menyulitkan dalam menyusun anggaran prioritas dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, untuk melakukan hal ini membutuhkan sinkronisasi, verifikasi, validasi serta integrasi data beserta alternative rumusan-rumusan *action plan* menuju percepatan serta ketepatan pencapaian tujuan organisasi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Maka dengan itu pemerintah melakukan suatu inovasi yang berkaitan dengan inovasi teknologi yaitu aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) atau biasa juga disebut *E-planning*. *E-planning* adalah aplikasi yang menginovasi proses Musrenbang Kecamatan, Kabupaten/Kota, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD hingga KUA-PPAS menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diharapkan dapat menjadi *tools* dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai waktu yang telah ditentukan, aturan ini sebagaimana diatur dalam Pemendagri No 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. *E-planning* yang berisi tentang menu-menu RPJMD selama 5 tahunan bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Renstra dan Renja SKPD yang disertai dengan laporan-laporan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah Daerah.

E-planning yang berisikan tentang menu-menu RPJMD selama 5 tahun bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Renstra dan Renja SKPD yang disertai dengan laporan-laporan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Labuhan Batu

merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem e-planning sebagai salah satu inovasi pemerintahan yang penerapannya dimulai pada tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

Aplikasi *e-planning* atau sistem perencanaan pembangunan daerah memfasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan program kerja. Sehingga proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dapat berjalan secara efektif, efisien dan integrasi. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.²

Adapun fenomena penelitian yang terdapat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu adalah Pemerintahan Kabupaten Labuhan batu merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem *E-planning* sebagai salah satu inovasi pemerintahan yang penerapannya dimulai pada tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Labuhan Batu. Sebelum tahun 2019, proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Labuhan Batu belum menggunakan sistem informasi atau masih bersifat manual, sehingga dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) menjadi tidak efektif dan tidak efisien (memakan tenaga dan waktu), sering terjadi ketidak selarasan antar

² Egis Teknotat Grandis, “Efektifitas Penerapan *E-planning* Program Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan pembangunan Kota banjar”, h.104

dokumen perencanaan (belum terintegrasi) dan tidak transparan (hasil wawancara dengan kepala badan Bappeda oleh Bapak Hobol Zulkifli Rangkuti, S.Sos.MM).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pengaruh Penerapan *E-planning* Terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhan Batu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah *E-Planning* berpengaruh terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhan Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis adalah Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Planning* terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan pengetahuan tentang pengaruh penerapan *E-Planning* terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

2. Bagi organisasi atau pihak yang terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pengaruh penerapan *E-Planning* terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhan Batu dan Sebagai informasi bagi para pengguna *E-Planning* untuk pencapaian efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur penyelenggaraan pemerintah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab 1 akan membahas tentang latar belakang penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab II akan diuraikan mengenai bahan yang melandasi tulisan ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab III akan memberikan deskripsi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan penentu sampel, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian menggunakan SPSS yaitu menggunakan uji deskriptif, uji kualitas data (uji validitas, uji reabilitas dan uji normalitas), analisis regresi sederhana, uji koefisien determinasi dan uji parsial (uji t).

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab V akan membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 E-Planning

2.1.1 Pengertian E-planning

Menurut Environment Agency dalam sutanta (2010) mengemukakan bahwa :

“E-planning merupakan bagian dari inisiatif e-government yang mengacu pada proses penyampaian layanan perencanaan secara elektronik menggunakan internet. Itu bertujuan untuk meningkatkan proses perencanaan tata ruang tradisional dan pengiriman ke masyarakat dan pemangku kepentingan.”³

Menurut Hakim dalam Nugroho (2017) menyatakan bahwa :

”Aplikasi *e-planning* merupakan wadah dari berbagai aplikasi lain yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan aplikasi *e-planning* mampu menghasilkan rencana strategis (Renstra) yang berkualitas karena digunakan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan selama 5 tahun kedepan agar tujuan dan sasaran perangkat daerah akan sesuai dengan yang direncanakan.”⁴

Menurut WD Juniawan menyatakan bahwa :

“E-planning adalah sebuah paradigma perencanaan baru yang muncul dalam kaitannya dengan penggunaan secara luas teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet, sistem informasi geografis dan teknologi virtual reality) dari sistem perencanaan berbasis kertas/manual sebagai sistem perencanaan konvensional. E-planning juga sering disinonimkan sebagai *e-government* atau pemerintahan digital yang digunakan pada bidang perencanaan kota dan daerah.”⁵

³ Environment Agency, “*E-planning* Dalam Sistem Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat”, Kinesik Vol. 6 no. 2 (2019), h. 144

⁴ Hakim Nugroho, “*E-planning* Dalam Sistem Perencanaan Pemerintahan Sulawesi Barat”, Kinesik Vol.6, No 3, h.145

⁵ Wayan Dedi Juniawan, “Sistem Pembangunan terintegrasi Melalui *E-planning*“, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 5, No 3, h.288

Suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini diharapkan BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder

2.1.2 Tampilan Utama Aplikasi E-Planning

Berikut ini adalah tampilan utama aplikasi *E-Planning* Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu.

Gambar 2. 1

Tampilan Utama Aplikasi *E-planning*



Sumber : <http://e-perencanaan.labuhanbatukab.go.id/>

Dalam sistem aplikasi *E-Planning* terdapat 4 modul diantaranya:

1. E-Musrenbang, yaitu portal aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk upaya sinergi perencanaan antara pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah baik di Kabupaten, Kecamatan serta Desa/Kelurahan. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (E-RKPD), yaitu Implementasi aplikasi e-perencanaan dimaksudkan membantu tim penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. E-SSH (Standar Satuan Harga), yaitu aplikasi pendukung untuk percepatan penyusunan dan kelengkapan database standarisasi harga yang meliputi Standar Satuan Harga (SSH). Analisa Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Data yang sudah dientry diaplikasi SSH akan langsung terintegrasi dengan aplikasi E-Perencanaan Bappeda Labuhanbatu, yang akan digunakan dalam penyusunan Renja, Renstra, RKPD, KUA-PPAS dan Aplikasi e-Musrenbang.
4. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), yang berisikan alamat yaitu Jl. H. Idris Hasibuan No.4 UJUNG BANDAR-RANTAUPRAPAT.

2.1.3 Tujuan Dan Manfaat E-planning

Menurut Peraturan Bupati Kampar No 59 Tahun 2018 tentang penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah menyatakan bahwa aplikasi *E-planning* merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi proses perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai

rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan dalam aplikasi *E-planning* memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Aplikasi *e-planning* ini menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Adapun beberapa manfaat diterapkannya aplikasi perencanaan *e-planning* yaitu :

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dapat dilakukan secara online.

2. Database terintegrasi, data perencanaan digunakan untuk sistem lain (sistem anggaran, sistem evaluasi dan monitoring).
3. Pengaturan waktu pertahapan, sehingga penyusunan RKPD dapat berjalan tepat waktu.
4. Dapat lebih mudah melakukan pengawasan anggaran.
5. Mendukung Single On (satu login untuk beberapa sistem).
6. Proses perencanaannya lebih praktis dan mudah.

Secara umum manfaat lain dari penerapan aplikasi *e-planning* antara lain :

1. Membantu pihak Bappeda dan SKPD dalam merumuskan rencana kerja sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil Musrenbang.
2. Membantu Bappeda dan SKPD dalam menyusun Indikator Kinerja yang terukur, sistematis dan berkelanjutan.
3. Membantu Bappeda dan SKPD dalam menyusun Dokumen Perencanaan baik menengah maupun tahunan sesuai indikator dan target kinerja yang telah disusun.
4. Membantu Bappeda dan SKPD dalam publikasi dokumen perencanaan ke tingkat daerah, Provinsi maupun pusat.

2.1.4 Pengguna Aplikasi E-planning

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah ini digunakan oleh lintas instansi. Instansi/user tersebut bisa mengakses sistem tersebut dengan batasan akses yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut beberapa user yang dapat mengakses aplikasi :

1. OPD bertugas, Pelaksana Perencanaan Daerah .
2. Bappeda bertugas, menseleksi program-program kegiatan.
3. Kepala daerah bertugas, memonitoring proses perencanaan.
4. DPRD bertugas mengawasi dan mengesahkan hasil perencanaan.
5. Masyarakat bertugas melihat dan mengetahui apa saja yang di rancang.

2.1.5 Kelebihan dan Kekurangan E-planning

E-planning adalah suatu penerapan dari program *e-government*, tentunya sistem *e-planning* ini memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem *e-planning*.

1. Kelebihan *E-planning*

a. Fungsi perencanaan yang menjadi efisien

Dalam hal ini pengguna *e-planning* memudahkan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan ataupun rencana, kemudian dari rencana tersebut akan mudah diupload di sistem *e-planning* tersebut. Jika ada suatu rencana yang berhubungan dengan anggaran, maka dalam sistem tersebut bisa langsung kita ketahui berapa anggaran yang diperlakukan.

b. Memudahkan dalam pengecekannya

Apabila ada suatu rencana yang dianggap keliru, maka dengan itu pemerintah akan bisa melakukan pengecekan dari sistem *e-planning* ini, ini lah yang menjadi kemudahan dalam menggunakan sistem *e-planning*.

c. Mudah dalam memasukan data pemerintah

Dalam melakukan penginputan data akan sangat mudah melakukannya dan data yang diinput akan tertata dengan urut didalam *e-planning* tersebut. Maka

dari itu sistem ini akan mengurangi kesalahan yang dilakukan pemerintah dalam proses input data.

d. Membuat pemerintah di Indonesia menjadi lebih transparan

Sistem *e-planning* dapat diketahui oleh masyarakat dimana saja, selagi mereka bisa mengakses media sosial/media massa. Masyarakat akan mengetahui apa saja rencana kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah kedepannya dan mereka juga akan mengkritik terhadap rencana tersebut maka dengan begitu pemerintah akan mendengarkan masukan dari masyarakat, hingga akan menciptakan pemerintah yang demokratis.

2. Kekurangan *E-planning*

Sistem kadang belum siap dalam proses input data, masalah ini sering terjadi pada saat ingin melakukan input data di sistem *e-planning*, sehingga dengan begitu pemerintah akan terhambat pada mereka ingin memasukan data.

2.2 Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

2.2.1 Pengertian Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Beberapa RKPD diharapkan saling terkait membentuk apa yang dinyatakan dalam RPJMD. Lima kali pelaksanaan RKPD maka diharapkan kondisi yang tertuang dalam sebuah RPJMD akan terwujud. RKPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Isi pokok RKPD adalah :

1. **Prioritas pembangunan daerah**
2. **Arah kebijakan umum daerah**
3. **Arah kebijakan keuangan daerah**
4. **Program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan SKPD pelaksanaan untuk setiap prioritas.**⁶

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

⁶ Baldrik Siregar, “**Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua)**”, UPP STIM YKPN, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2015

(RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.

RKPD ini adalah rencana program/kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, proses penyusunan RKPD dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

2.2.2 Fungsi, Kedudukan dan Pendekatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

a. Fungsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut :

- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

- Mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA SKPD.
- Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.
- Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan.
- Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah.
- Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD.
- Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
- Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat.

b. Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD,

KUA, dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember.

Substansi RKPD memuat Program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

c. Pendekatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down dan bottom-up.

1. Pendekatan Teknokratis (Strategi dan Berbasis Kinerja)

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu.
- Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah masa kini.
- Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD.
- Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan.
- Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah).
- Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja.
- Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan standar pelayanan minimal.
- Tolok ukur dan target kinerja keluar.
- Tolok ukur dan kinerja hasil.
- Pagu indikatif program kegiatan.
- Prakira maju pendanaan program dan kegiatan untuk 1 tahun berikutnya.
- Kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan disetiap tahapan penyusunan RKPD.
- Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam pengambilan keputusan.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.
- Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal.
- Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD.
- Pelibatan media.
- Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif.

3. Pendekatan Politis

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat ha-hal sebagai berikut :

- Konsultasi dengan kepala daerah unruk penerjemahan yang tepat, sitematis atas visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategis, kebijakan dan program pembangunan daerah.
- Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD.
- Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD.
- Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD.

- Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan meningkat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

4. Pendekatan Bottom-up

Pendekatan Bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih.
- Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.
- Mempertimbangkan hasil forum SKPD.

5. Pendekatan Top-down

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- Sinergi dengan RKP dan RENJS K/L.
- Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD.
- Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD.
- Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem .
- Sinergi dan komitmen pemerintahan terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, Pemenuhan Hak Asasi

Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.

2.2.3 Prinsip Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Murenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang tingkat Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), harus memenuhi tiga prinsip sebagai berikut :

1. *Participative*, yaitu rakyat harus turut serta dalam prosesnya. Karena secara langsung masyarakat akan menikmati keuntungan dari hasil perencanaan jika mereka ikut andal dalam prosesnya.
2. *Sustainable*, artinya perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut atau berkesinambungan sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan masyarakat dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip *sustainable* ini juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.
3. *Holistic*, sesuai dengan artinya “menyeluruh”, prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaan tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari seluruh aspek dan dalam

keutuhan suatu konsep. Dalam konsep tersebut juga harus mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Dengan demikian dengan adanya konsistensi antara RKPD dengan APBD dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka akan terwujud sinergitas antara perencanaan dengan penganggaran untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Harapannya, Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjalankan peran dan kewenangannya masing-masing yang terintegrasi dengan rencana tata ruang dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang di miliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian Erik Kalalemban, Alwi, Arianto dengan judul *E-planning* Dalam Sistem Perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Penggunaan *E-planning* dalam sistem perencanaan memudahkan dalam menentukan program prioritas, menata berbagai aspek data perencanaan pembangunan secara integritas dan komprehensif, baik dalam struktur, jenis maupun format data.⁷

2. Penelitian Benni Yulison dan Isril dengan judul Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar. Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Ada beberapa ketidak sesuaian tahapan dan tata cara yang dilaksanakan pemerintahan kabupaten Kampar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kampar 2014 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung.⁸

Disini penelitian terdahulu memfokuskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyusunan RKPD kabupaten. Sedangkan penelitian ini memfokuskan manfaat penerapan e-planning dalam penyusunan RKPD.

3. Penelitian Rahmadani 2020 dengan judul Pemanfaatan Sistem *E-planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi kasus BAPPEDA Kota Medan. Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Pemanfaatan sistem *e-planning* dalam badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) kota medan penulis menggunakan teori Thomson dan menguraikan pembahasannya sebagai berikut : berdasarkan

⁷ Erik Kalalemban, et al, "***E-planning* Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Sulawesi Barat**", Kinesik, Vol 6, no 2, h.144

⁸ Beni Yulison, Isril, "**Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar**" Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol 2, no 3, 2014,h.246

hasil penelitian penulis melihat sistem *e-planning* mempunyai manfaat membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota medan dalam merumuskan rencana kerja sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil musrenbang, mampu membantu Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota medan menyusun dokumen perencanaan baik menengah ataupun tahunan sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah disusun, membantu dalam publikasi dokumen perencanaan keningkat daerah, provinsi maupun pusat.⁹

Disini penelitian terdahulu memfokuskan pemanfaatan *e-planning* saja yang diterapkan dalam badan perencanaan pembangunan kota medan yang digunakan oleh pegawai BAPPEDA kota medan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan penerapan *e-planning* terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada BAPPEDA kabupaten Labuhanbatu.

4. Penelitian Diana Rosalina Harahap 2020 dengan judul Efektivitas Penerapan *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini BAPPEDA masih belum efektif dalam menerapkan sistem *e-planning* karena tidak memenuhi variabel yang dijadikan syarat oleh Duncan. Adapun variabel

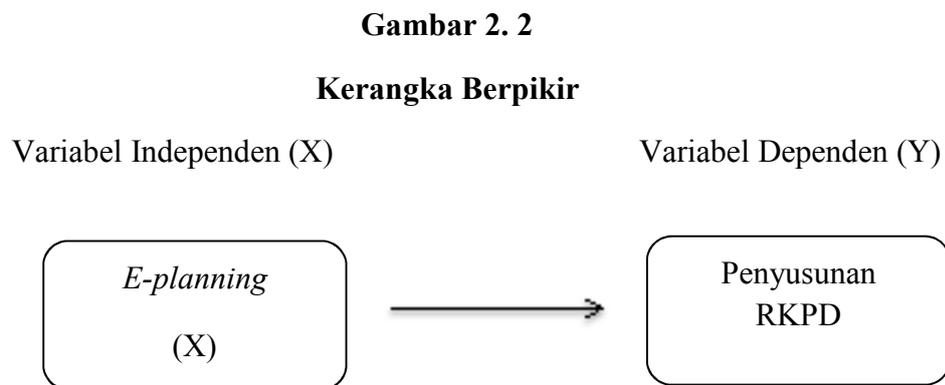
⁹ Rahmadani, “Pemanfaatan Sistem *E-planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Bappeda Kota Medan”, 2020, h.53

yang tidak terpenuhi adalah pencapaian tujuan dan juga adaptasi, sementara variabel yang terpenuhi adalah integrasi.¹⁰

Disini penelitian terdahulu memfokuskan pada hambatan penerapan sistem *e-planning* di pemerintahan Kabupaten Tapanuli selatan. sedangkan penelitian ini membahas kelebihan dan kekurangan dari penerapan *e-planning* di kabupaten Labuhanbatu.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari gambar diatas penulis ingin mengkaji dan menguji apakah *e-planning* berpengaruh terhadap Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD), dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

¹⁰ Diana Rosalina Harahap, “ Efektifitas Penerapan *E-planning* Dalam Perencanaan Pembangunan di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan”, Perspektif, h.85

2.5 Hipotesis

1. . Penerapan *E-planning* berpengaruh terhadap penyusunan RKPD.

E-planning merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*) sebagai sebuah alat penyusun RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No.86 Tahun 2007. *E-planning* juga merupakan suatu sistem untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen rencana kerja pemerintah daerah secara elektronik.

Menurut penelitian yang mendukung yaitu penelitian kualitatif Virgiana Ningsi,dkk (2018) menunjukkan bahwa dalam penerapannya pemanfaatan sistem *e-planning* sudah dilakukan dengan baik namun terdapat beberapa hambatan yaitu, sumber daya manusia yang belum merata dalam pengolahan aplikasi *e-planning* dalam penyusunan RKPD. Penelitian Rahmadani (2020) menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi *e-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Maka dari uraian diatas dirumuskan hipotesis.

H1 : Penerapan *E-Planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa :

“ Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.¹¹

Metode Penelitian kuantitatif juga merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta pada masing-masing hubungannya. Penelitian ilmiah ini yang dimana bersifat sistematis, terencana dan terstruktur berprinsipkan logika hipotesis guna mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori- teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam secara deskriptif.

¹¹ Sugiyono, “**Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**”, Alfabeta, Bandung, 2007, h.232

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), yang beralamatkan di Jl. H. Idris Hasisbuan No.4 UJUNG BANDAR-RANTAUPRAPAT.

3.2.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, Penelitian ini dilaksanakan pada kantor BAPPEDA Kabupaten Labuhan Batu yaitu pada tanggal 7 Mei 2021 sampai tanggal 10 Juni 2021.

3.3 Populasi dan Penentu Sampel

Menurut Sugiyono populasi dapat diartikan sebagai berikut :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”¹²

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 30 orang.

Menurut Sugiyono, **“sampel adalah jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”**.¹³ Adapun teknik pengambilan sampelnya adalah metode sensus dimana seluruh populasinya dijadikan sampel. Yang terdiri dari :

1. Kepala Bappeda
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang
4. Kepala Sub Bidang/Sub Bagian

¹² Sugiyono, “**Metode Penelitian pendidikan**”, Cetakan ke-12, Alfabeta, Bandung, 2018

¹³ **Ibid** .hal 181

5. Staf

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.

Berdasarkan sumbernya data yang diterapkan adalah :

1. **“Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.”¹⁴**

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain melalui catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informasi.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Angket atau kuesioner merupakan sebuah cara atau teknik yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan beberapa lembar kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab oleh para responden. Penelitian ini menggunakan

¹⁴ Sugiyono, “**Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**”, Alfabeta, Bandung, Edisi 2016

angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan skala likert dengan lima angka penilainnya yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju. (4) Setuju, (5) Sangat Setuju

2. Studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.
3. Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan antara dua orang untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah informasi tentang penelitian tersebut. Wawancara yang digunakan adalah mengajukan pertanyaan yang terstruktur kepada kepala badan.
4. Internet Searching yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa :

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹⁵

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih yaitu pengaruh penerapan *e-planning* terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Maka penulis mengelompokan variabel yang

¹⁵ ibid. hal.68

digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen (x) dan variabel dependen (y). adapun pejelasanannya sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas (x) variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah *E-planning*

2. Variabel terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2019). Dalam penelitian ini variabel dependent yang diteliti adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

3.5.1 Variabel bebas (independent variabel)

Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah *E-planning*. *E-planning* atau sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah sebuah alat penyusun RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pemandagri No.86 Tahun 2017. Indikator *e-planning* adalah :

1. Transparansi dalam pengelolaan dan pengaksesan aplikasi *e-planning*.

2. Pencapaian efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur penyelenggara pemerintah.
3. Ketepatan penginputan data.
4. Kualitas output yang dihasilkan.

3.5.2 Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini variabel dependent yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dan Musrenbang tingkat kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Penganggaran

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting dalam perencanaan, pengendalian dan pembuat keputusan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala

kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

3.6 Teknik Analisis

Teknik dari analisis data dari penelitian ini adalah analisis Deskriptif/Kuantitatif. Didalam analisis data ini merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai kemudian untuk menarik kesimpulan penelitian.

Aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah SPSS. Metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengelolah, dan menganalisis data dan kemudian menyajikan dalam bentuk yang baik. Analisis ini memberikan gambaran atau suatu data yang dilihat dari *minimum*, *minimum*, rata-rata (*mean*), standar deviasi.

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel *e-planning* dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

3.6.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono ; **“Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas merupakan ukuran yang benar – benar mengukur apa yang akan diukur”**.¹⁶

Pengujiannya dilakukan secara statistik, yang dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dan skor total dengan menggunakan metode *product moment pearson correlation*. Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas:

1. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut valid pada signifikansi 0,05 (5%).
2. Jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuisisioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *cronbach's alpha* (α), dimana suatu instrumen dapat dinyatakan handal (*reliable*) bila $\alpha > 0,60$.

¹⁶ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta Edisi 2016, Bandung, 2016

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel *dependent* dan variabel *independent* memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika hasil distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang terdistribusi dapat dilakukan dengan uji statistik. Uji statistik menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

1. Jika nilai signifikan (sig.) $> 0,05$ maka data penelitian berdistribusi normal
2. Sebaliknya jika signifikan (sig.) $< 0,05$ maka data penelitian tidak berdistribusi normal

3.6.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Metode yang digunakan untuk menguji Hipotesis ini adalah Analisis Regresi Linear. Penelitian ini adalah *e-planning* sebagai alat ukur penyusunan RKPD maka model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi sederhana yang hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

Y : Variabel Dependen yaitu penyusunan RKPD

a : Harga Y ketika Harga X=0 (harga konstanta)

b : Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Jika nilai probabilitas $< 5\%$ dan $\beta >$ dari nol maka hipotesis tidak ditolak, sehingga disimpulkan e-planning berpengaruh positif terhadap penyusunan RKPD . Namun jika probabilitas $> 5\%$ maka hipotesis ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa e-planning tidak berpengaruh positif terhadap penyusunan RKPD.

X : E-planning

e : Residual atau Error

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran dari masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif atau negative selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted Rsquare*). Menurut Sugiyono : **"Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (variabel lainnya) sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya."**¹⁷

¹⁷ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta , Bandung, 2016

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R² berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

3.6.5 Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis ini menunjukkan uji-t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara hipotesis. Hipotesis alternatif atau H_a adalah “ Penerapan *E-planning* berpengaruh terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Hipotesis yang diajukan adalah H₁ yang digunakan adalah “ Penerapan *E-planning* berpengaruh terhadap positif dan signifikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”.

Hipotesis dalam setiap penelitian perlu diuji, tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian hipotesis penelitian ini menggunakan bantuan SPSS. Untuk kriteria signifikan dalam penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan $<0,05$ artinya berpengaruh secara signifikan.
- b. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan $<0,05$ artinya tidak berpengaruh signifikan.